

ABSTRAK

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan penyebaran konten yang memuat foto atau video porno tanpa izin atau persetujuan dari korban. Perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dari pelaku seperti mendapatkan ancaman, pemerasan dan kekerasan fisik. Beberapa undang-undang yang digunakan untuk menangani *revenge porn* seperti UU ITE, UU Pornografi belum berpihak kepada korban. Perlindungan hukum secara khusus terhadap korban diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi, terjadi kekaburan pada Pasal 42 ayat (3) yakni pada frasa “gerak pelaku” yang menimbulkan multitafsir mengenai gerak pelaku bagaimana yang dibatasi dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban *revenge porn* berhak mendapat perlindungan sementara dari aparat kepolisian seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai bentuk perlindungan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum – *Revenge Porn* – UU TPKS

ABSTRACT

Revenge porn is the distribution of content containing pornographic photos or videos without the victim's permission or consent. Women as victims of revenge porn often receive bad treatment from perpetrators such as threats, blackmail and physical violence. Several laws used to deal with revenge porn, such as the ITE Law and the Pornography Law, have not sided with the victims. Special legal protection for victims is regulated in the Sexual Violence Crimes Law. However, there is ambiguity in Article 42 paragraph (3), namely in the phrase "movement of the perpetrator" which gives rise to multiple interpretations regarding what movement of the perpetrator is limited in that article. Therefore, this research will explain legal protection for victims of revenge pornography.

The method used in this research is a normative research method. The approaches taken are the statutory approach and the case approach.

The results of this research show that revenge porn victims have the right to receive temporary protection from the police as stated in Article 42 of the Sexual Violence Crime Law and Article 69 of the Sexual Violence Crime Law regarding forms of victim protection.

Keywords: Legal Protection – Revenge Porn – TPKS Law